

# Rencana Kerja (RENJA)

**Kecamatan Kebasen**  
**Tahun 2023**



**PEMERINTAH KECAMATAN KEBASEN**

Jalan Raya PUK NO. 50 KEBASEN Kode Pos 53172

Telp. (0281) 6847660 email: kebasen@banyumaskab.go.id

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan maupun kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data dan diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Renja tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan masyarakat pada umumnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini kami ucapkan terima kasih.

Kebasen, 2023  
CAMAT KEBASEN  
  
**WAHYU ADHI FIBRIANTO, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780220 199612 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I_PENDAHULUAN .....	3
1.1. LATAR BELAKANG .....	3
1.2. LANDASAN HUKUM .....	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	7
1.4. SISTEMATIKA .....	7
BAB II_HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH .....	9
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	19
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	24
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	32
BAB III_TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	41
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	41
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....	41
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	42
BAB IV_RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	51
BAB V_PENUTUP .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan kewenangannya telah menyusun RKPD Tahun 2023 dengan mendasarkan pada arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Tengah serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan menengah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025, dan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Sebagai catatan Penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari penjabaran pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2023 dan periode tahap ke IV dari RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kebasen (Renja Kecamatan Kebasen) Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD ;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kebasen Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Kebasen yang merupakan penjabaran dari visi Bupati wakil Bupati Banyumas seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 yaitu :

**“ Mewujudkan Banyumas yang Maju Adil-Makmur dan Mandiri ”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kecamatan Kebasen Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan Kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatifitas berbasis sumber daya lokal
5. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan
6. Menciptakan Iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfraktuktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebasen tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Kebasen Tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kebasen tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo- Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-TegalPemalang;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan stunting;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018- 2023;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kebasen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagian acuan Kecamatan Kebasen dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Kebasen selama tahun 2023.

### 1.4. SISTEMATIKA

#### **BAB I PENDAHULUAN**

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 **Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 **Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program

nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals ). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

**2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,** menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM**

**3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

**3.2 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai factorfaktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

### **BAB IV PENUTUP**

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebasen adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kebasen. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kebasen ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kebasen selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **A. *Penetapan Indikator Kinerja***

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### **B. *Capaian Analisis Kinerja***

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

#### **Evaluasi Program Tahun 2022**

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Kecamatan Kebasen tahun 2022 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Kebasen setelah perubahan sebesar Rp. 2.162.678.771 dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 2.096.841.771 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 65.837.000. Penyerapan anggaran belanja langsung Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.138.421.647 (97,78%) dari total anggaran belanja sebesar Rp. 2.162.678.771. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa merupakan

program dengan serapan anggaran terbesar (100%), sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan serapan terkecil yaitu (98.83%).

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari 5 program dan 11 kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas**

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		
					Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian %
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		86	86	85	85,75	100,88
Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat							
	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		
					Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	10	3	3	3	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Kegiatan	36	12	12	12	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	3	3	3	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	42	14	14	11	78.57
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	4	4	4	4	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	6	6	6	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		
					Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian %
	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	6	6	6	6	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5	5	5	5	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	12	12	12	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	3	3	3	3	100
	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	76000	16000	30000	22024	98.73
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	2100	686	7	9	128,57
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	15	10	5	5	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		
					Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian %
	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	4	4	4	4	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	2	2	2	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	36	12	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	12	10	10	13	130
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	3	3	3	3	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	15	15	15	15	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	9	3	3	3	100

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		
					Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100
	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	100	100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
	Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keg	3	3	1	1	100
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
	Jumlah unsur yang bersinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	unsur	8	8	8	8	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	Jenis	2	2	2	2	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		
					Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian %
	pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	Orang	21000	11746	7000	7209	120,15
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	Desa	12	12	12	12	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	12	12	12	12	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
	Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Desa	1080	360	360	480	133,33
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	Kali	72	24	24	25	104,17
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		
					Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian %
	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	6	2	2	2	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
	Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	unsur	5	5	5	5	100
]Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							
	Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat	Kali	6	6	2	2	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100	100	100
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Desa	36	12	12	12	100

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022		
					Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian %
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Kali	75	25	25	25	100
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							
	Frekwensi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kali	8	0	N/A	N/A	0

Sumber : e money 2022: form 1 & form 2 2022

CAMAT KEBASEN

WAHYU ADHI FIBRIANTO, S.STP  
Pembina Tk. I  
NIP. 19780220 199612 1 001

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, adalah sebagai berikut:

#### 1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

#### 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
  1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,

- keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
    - a. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
      - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
      - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
      - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
      - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
    - b. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
      1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan ;
      2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
      3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
    - c. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
      1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
      2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
    - d. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
      - 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau
      - 2) pemeliharaan prasarana instansi vertikal yang terkait;
      - 3) pelaksanaan dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
      4. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;

- f. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
  - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
  - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
- i. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - i. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - ii. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;

- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok jabatan fungsional.

**Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja tahun 2023 sebesar Rp 2.146.501.000 terurai dalam 5 program dan 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Kebasen  
Kabupaten Banyumas**

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2022	Target 2023
<b>PROGRAM 1.1</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.1.1	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100
1.1.2	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100
<b>PROGRAM 1.2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				
1.2.1	Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
<b>PROGRAM 1.3</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				
1.3.1	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
<b>PROGRAM 1.4</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
1.4.1	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100
<b>PROGRAM 1.5</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
1.5.1	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100
1.5.2	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
1.5.3	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100
1.5.4	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100

Sumber : E-money Form 4 2022

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat desa dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kebasen sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan kehumasan serta kerumahtanggaan
2. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
3. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurang;
4. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah;
5. Data Aset dan Barang Daerah Milik Kecamatan masih belum lengkap.
6. Kurangnya staf permas karena beban kerja kasi permas yang tinggi
7. Terkait dengan Tusi PKK masih belum optimal karena belum adanya staf teknis yang mengurus hal tersebut.

8. Banyaknya permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah desa yang harus di follow up namun keterbatasan tenaga menjadi tidak bisa tercover semuanya.
9. Belum sinerginya perangkat desa yang membidangi permas dan kesra dengan seksi permas.
10. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan
11. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan.
12. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan .
13. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;
14. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
15. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Sinergitas dengan Pendamping Desa perlu ditingkatkan
17. Kurangnya staf yang menguasai pemerintahan;
18. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan ke Desa
19. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas);
20. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
21. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat.
22. Info kegiatan terkait kecamatan belum optimal
23. Masih adanya personil yang belum bekerja sesuai dengan Tugasnya.
24. Masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Kebasen menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebasen. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

#### A. Strength (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
2. SDM Kantor Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 25 orang yang terdiri dari : pendidikan S-2 sebanyak 2 orang, S-1 sebanyak 8 orang, pendidikan D-3 sebanyak 3 orang, pendidikan SMA sebanyak 12 orang. Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Kebasen sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah.
3. Sarana dan Prasarana  
Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kebasen sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.
4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

#### B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah, Kecamatan Kebasen juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya jumlah ASN dan masih belum banyak yang menguasai IT
2. Masih kurangnya disiplin ASN
3. Masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi
4. Kebersihan Kantor perlu ditingkatkan

#### C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Peluang-peluang tersebut adalah

1. Pemberian beasiswa dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan jenjang pendidikan.
2. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan.
4. Adanya kerjasama dengan Desa atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.

5. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak.
6. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif
7. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah.
8. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
9. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar
11. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

#### D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Kebasen tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
2. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai.
3. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Banyumas (tanah longsor, banjir, angin puting beliung).
4. Kurangnya etos kerja
5. Tingginya tingkat pengangguran
6. Tingginya jumlah penduduk miskin
7. Tingginya ancaman bencana
8. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan

yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya asporasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Kebasen yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pelayanan publik, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di kecamatan
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas penyelenggaraannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kebasen dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurangnya optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

## **ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

### ***Tugas Kecamatan Kebasen***

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

### ***Fungsi***

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan Perijinan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban serta kelurahan;
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;

3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
4. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
6. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Isu-isu penting untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kebasen pada tahun 2023 adalah:

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan terhadap anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Kebasen tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Kebasen pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN.
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
9. Mewujudkan ASN yang melek teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office

### ***Kebijakan***

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa

3. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
5. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
6. Pembersihan Sampah Liar dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even- even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
7. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
9. Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Dari rancangan awal RKPD Kecamatan Kebasen telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kebasen Tahun 2018-2023 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan Awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan yang merupakan repersentasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebasen dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan pembiayaan penerimaan daerah berikut pendanaan indikatif.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023  
Kabupaten Banyumas

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Lokasi	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Lokasi	Pagu Indikatif
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>		<b>1.965.195.111</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>		<b>2.006.501.000</b>
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.591.000	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.591.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	12 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	4.591.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	4.591.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.431.191.111	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.456.109.869
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang /bulan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	1,401,491,111	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang / bulan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	1.423.229.869

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	29.700.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	32.880.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				256.063.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah				148.756.631
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	3.672.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	3.672.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	15.214.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	19.540.831
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	12.515.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	12.515.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	52.955.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	52.955.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	14.758.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	14.758.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	45.315.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	45.315.800
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				56.662.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				56.658.500
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	52.662.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	45.658.500
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	4.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	11.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				293.770.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				305.835.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	45.974.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	45.974.200
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	6.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	6.500.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	241.296.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	253.360.800
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				34.550.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				34.550.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	12.050.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	12.050.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	7.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	7.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	15.000.000
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik</b>	<b>100 %</b>		<b>25.942.500</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik</b>	<b>100 %</b>		<b>20.220.000</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				25.942.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.220.000

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	18.825.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	14.100.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	7.117.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	6.120.000
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>100 %</b>		<b>41.265.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>100 %</b>		<b>42.497.000</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				41.265.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				42.497.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 lembaga	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	10.960.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 lembaga	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	8.260.000
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 dokumen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	30.305.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 dokumen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	34.237.000

	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100 %</b>		<b>9.927.500</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100 %</b>		<b>30.920.000</b>
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5.875.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				26.290.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.625.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.650.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	3.250.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	3.640.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4.052.500	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4.630.000

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	4.052.500	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 laporan	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	4.630.000	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES</b>	<b>100 %</b>		<b>32.433.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES</b>	<b>100 %</b>		<b>46.363.000</b>	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				32.433.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				46.363.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 dokumen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	12.433.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 dokumen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	16.363.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 dokumen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	20.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 dokumen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	30.000.000	
<b>JUMLAH</b>					<b>2.074.763.111</b>	<b>JUMLAH</b>					<b>2.146.501.000</b>

## PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kecamatan Kebasen akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, para pelaku pariwisata, kalangan seniman, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Kebasen maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis SKPD di luar Kecamatan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan SKPD baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Kelurahan.

Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Banyumas  
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kebasen

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun demikian untuk Kecamatan tidak ada.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja, Kebijakan Nasional yang harus di dukung dan dilaksanakan oleh semua SKPD.

#### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Kebasen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik harus menetapkan tujuan sehingga Kecamatan Kebasen dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Banyumas

**“ Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun sistem integritas Birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat ”** adalah sebagai berikut:

#### ***Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima***

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Kebasen dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka **sasaran pembangunan** di Kecamatan Kebasen adalah sebagai berikut : **Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat**. Dengan indikator sasarannya meliputi dua hal yaitu : **Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu dan Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif**.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kebasen beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
  - b. Pencapaian SDGs,
  - c. Pengentasan kemiskinan,
  - d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- a. Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk rancangan awal RKPD 2023, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja tahun 2023 sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pagu : Rp. **1.934.917.655**

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 4.591.000
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 1.374.435.072
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 102.892.900
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 11.500.000
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 421.948.683
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 19.550.000

#### 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pagu : Rp. **9.730.00**

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
Pagu Anggaran : Rp. 9.730.300

#### 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Pagu : Rp. **32.828.000**

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Pagu Anggaran : Rp. 32.828.000
- 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
Pagu : **Rp. 49.490.000**
  - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Pagu Anggaran : Rp. 46.960.000
  - b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  
Pagu Anggaran : Rp. 2.530.000
- 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  
Pagu : **Rp. 42.793.000**
  - a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Pagu Anggaran : Rp. 42.793.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Banyumas  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kebasen  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kebasen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur						
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																
7	01	<b>KECAMATAN</b>									2,146,501,000				2,356,542,200			
7	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									2,006,501,000				2,202,542,200		
7	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									4,591,000				5,050,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	100 %	12 Laporan	100 %	4,591,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	100 %	5,050,000
7	01	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									1,456,109,869				1,601,720,856	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	100 %	13 Orang/bulan	100 %	1,423,229,869	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	100 %	1,565,552,856

7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	100 %	12 Dokumen	100 %	32,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	100 %	36,168,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>148,756,631</b>				<b>163,620,914</b>		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	100 %	6 Paket	100 %	3,672,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	100 %	4,039,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	100 %	5 Paket	100 %	19,540,831	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	100 %	21,494,914
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	100 %	3 Paket	100 %	12,515,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	100 %	13,766,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	100 %	4 Paket	100 %	52,955,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	100 %	58,250,000

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	Jumlah Paket Barang Cetakandan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	100 %	2 Paket	100 %	14,758,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	100 %	16,224,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	100 %	60 Laporan	100 %	45,315,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	100 %	49,847,000
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>56,658,500</b>					<b>62,324,350</b>	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Kebasen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik perangkat daerah yang memadai Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	100 %	4 Unit	100 %	45,658,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Kebasen	100 %	50,224,350
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Kebasen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik perangkat daerah yang memadai Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	100 %	3 Unit	100 %	11,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Kebasen	100 %	12,100,000
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>305,835,000</b>					<b>331,821,080</b>	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Kecamatan Kebasen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	100 %	12 Laporan	100 %	45,974,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Kecamatan Kebasen	100 %	45,974,200
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	Cakupan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Kecamatan Kebasen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	100 %	3 Laporan	100 %	6,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Kecamatan Kebasen	100 %	7,150,000

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Cakupan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Kecamatan Kebasen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Cakupan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	100 %	12 Laporan	100 %	253,360,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Kecamatan Kebasen	100 %	278,696,880
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>34,550,000</b>				<b>38,005,000</b>		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Kecamatan Kebasen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	100 %	6 Unit	100 %	12,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Kecamatan Kebasen	100 %	13,255,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Persentase pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Kecamatan Kebasen	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	100 %	15 Unit	100 %	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Kecamatan Kebasen	100 %	8,250,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Kecamatan Kebasen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Gambarsari	100 %	3 Unit	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Kecamatan Kebasen	100 %	16,500,000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							<b>20,220,000</b>				<b>22,242,000</b>		
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>							<b>20,220,000</b>				<b>22,242,000</b>		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaitdengan Nonperizinan	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baikKecamatan Kebasen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Persentase pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baikKecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	14,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani denganbaik Kecamatan Kebasen	100 %	15,510,000

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Kebasen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	6,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Kebasen	100 %	6,732,000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							<b>42,497,000</b>			<b>46,746,700</b>			
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>							<b>42,497,000</b>			<b>46,746,700</b>			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kebasen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kelurahan	100 %	5 Lembaga	100 %	8,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desayang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kebasen	100 %	9,086,000
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kebasen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	34,237,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desayang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kebasen	100 %	37,660,700
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>							<b>30,920,000</b>			<b>34,012,000</b>			
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>							<b>26,290,000</b>			<b>28,919,000</b>			

7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Kebasen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Kebasen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	22,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Kebasen	100 %	24,915,000
---	----	----	------	----	---	--	--	--	--	-------	-----------	-------	------------	------------------------------	--	--	-------	------------

7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kebasen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	3,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kebasen	100 %	4,004,000
7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>							<b>4,630,000</b>			<b>5,093,000</b>		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase pelaksanaan koordinasi ketertiban umum Kecamatan Kebasen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	4,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kebasen	100 %	5,093,000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>							<b>46,363,000</b>			<b>50,999,300</b>		
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>							<b>46,363,000</b>			<b>50,999,300</b>		
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Kebasen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kelurahan	100 %	7 Dokumen	100 %	16,363,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Kebasen	100 %	17,999,300
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Kebasen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Kebasen	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Kebasen	100 %	33,000,000
<b>TOTAL</b>												<b>2,146,501,000</b>			<b>2,356,542,200</b>		

Sumber : Renja Sistem Informasi Pemerintah Daerah

CAMAT KEBASEN

WAHYU ADHI FIBRIANTO, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 197802201996121001

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **RANCANGAN AWAL RENJA**

Rencana Kerja Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Matrik Tahun 2023 berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023**  
**KECAMATAN KEBASEN**  
**Kabupaten Banyumas**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>2.789.616.000</b>				
<b>KECAMATAN</b>				<b>2.789.616.000</b>				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>2.682.002.000</b>				
	<b>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>100 %</b>					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun		3 dokumen	5.059.000				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan		12 kegiatan	5.059.000				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola		3 jenis	2.058.868.000				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		14 orang	2.023.955.000				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD		4 orang	34.913.000				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola		6 jenis	150.995.000				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia		6 jenis	4.047.000				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		5 jenis	5.059.000				

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		3 jenis	9.668.000				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia		12 bulan	73.168.000				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia		3 jenis	2.270.000				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan		700 kali	46,783,000				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia		5 jenis	71.464.000				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia		4 unit	54.178.000				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia		3 unit	17.286.000				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia		3 jenis	301.620.000				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola		12 bulan	50.691.000				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan		3 jenis	10.929.000				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai non ASN		10 orang	240.000.000				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan		4 jenis	93.996.000				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional SKPD yang dipelihara		6 unit	31.978.000				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara		15 unit	8.500.000				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara		3 unit	53.518.000				

<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>28.536.000</b>				
	<b>Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik</b>		<b>100 %</b>					
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan		2 jenis	28.536.000				
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani		8000 orang	20.694.000				
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar		12 desa	7.842.000				
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				<b>38.302.000</b>				
	<b>Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>		<b>100 %</b>					
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat		12 desa	24.438.000				
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		360 orang	12.143.000				
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat		24 kali	12.295.000				
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>11.839.000</b>				
	<b>Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>		<b>100 %</b>					

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		2 kegiatan	7.741.000				
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan		5 unsur	4.098.000				
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Frekuensi rakor dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		2 kali	3.643.000				
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		2 kegiatan	4.098.000				
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan linmas		4 kegiatan	4.098.000				
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>42.801.000</b>				
	<b>Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES</b>		<b>100 %</b>					
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES		12 desa	42.801.000				
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi pembinaan dan pengawasan APBDes		25 kali	12.801.000				
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Frekuensi fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa		3 kali	30.000.000				

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kebasen Tahun 2023. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Kecamatan Kebasen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2023, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Kecamatan Kebasen Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2023 dan Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perubahan-OPD) Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Kecamatan Kebasen dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Kecamatan Kebasen menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2023 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju “Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”.

CAMAT KEBASEN



WAHYU ADHI FIBRIANTO, S.STP  
Pembina Tk. I  
NIP. 197802201996121001